

**POTRET PERILAKU DAN STRATEGI PEREMPUAN BURUH
PERKEBUNAN DALAM MERESPONS KEMISKINAN
(STUDI KASUS DI PTPN X AJUNG KABUPATEN JEMBER)**

**THE PORTRAIT OF CONDUCT AND STRATEGIES WOMEN PLANTATION
WORKERS IN RESPONDING TO POVERTY
(PTPN X CASE STUDY IN THE DISTRICT AJUNG JEMBER REGENCY)**

A. Erna Rochiyati Sudarmaningtyas

Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Jember
unej_press@ymail.com

Abstrak

Perbedaan latar belakang etnik tidak melahirkan pola perilaku dan strategi yang berbeda pada komunitas kaum perempuan buruh perkebunan di PTPN X Ajung Kabupaten Jember karena mereka sama-sama berpendidikan rendah, menikah usia dini, tidak memiliki *life skill*, berperan ganda bahkan multi ganda, dan penopang atau pilar utama perekonomian keluarga. Namun, mereka tidak mengidentifikasi diri sebagai orang miskin karena tidak hanya mengandalkan sektor perkebunan sebagai satu-satunya penopang hidup tetapi juga mengembangkan pekerjaan alternatif di sektor informal.

Kata kunci: perilaku, perempuan buruh, perkebunan, strategi.

Abstract

Differences in ethnic background do not lead to the different behavior patterns and strategies of the female plantation workers of the PTPN X Ajung, Jember regency. This is due to their similarities in low education level, early marriage ages and they have no sufficient life skills, play dual and even multiple roles, main income earners for their families. However, they do not identify themselves as poor people because of relying not merely on plantation sector, but also doing alternative jobs in work in informal sector.

Keywords: behavior, female workers, plantation, strategy.

A. Pendahuluan

Pada umumnya keluarga buruh perkebunan PTPN di wilayah Kabupaten Jember mengalami problema kemiskinan, khususnya keluarga buruh di Perkebunan PTPN X Ajung Kabupaten Jember. Problema ini mendorong kaum perempuan (istri) keluarga buruh tersebut berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya dan sekaligus perannya dalam menegosiasikan kesetaraan gender. Problema kemiskinan yang dihadapi

keluarga buruh perkebunan ini dapat dicermati dari ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi empat persoalan mendasar, yaitu: (1) pergulatan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; (2) tersendat-sendatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya; (3) terbatasnya akses terhadap jaminan kesehatan keluarga; serta (4) sistem sosial dan ekonomi-politik yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada mereka sebagai *wong cilik*.

Kondisi kemiskinan akut ini pula yang telah memaksa sebagian anggota keluarga buruh perkebunan melakukan migrasi keluar desa untuk bekerja di sektor informal yang secara ekonomi lebih menjanjikan (Gilbert dan Gugler, 1996:55, 67; Susanto, 1995:16-18). Opsi ini pula yang banyak ditempuh keluarga buruh perkebunan di Kabupaten Jember. Dari hasil penelusuran awal diperoleh informasi bahwa anggota keluarga yang keluar daerah untuk bekerja sebagai buruh migran kebanyakan adalah kaum laki-laki (suami). Dengan pilihan keluar daerah untuk bekerja di sektor informal, mereka berharap akan mendapatkan peruntungan dengan upah yang menjanjikan. Pola demikian, menurut Gugler (1996:67), disebut sebagai pola mengadu nasib dengan sistem *lotere* kerja di perkotaan.

Kenyataannya, hasil kerja yang dilakukan suami di luar daerah tidak pernah mampu mengentaskan keluarga mereka dari belenggu kemiskinan. Sebagai konsekuensinya, kaum perempuanlah yang kemudian banyak mengambil peran, baik dalam mengurus pekerjaan domestik maupun dalam mencari nafkah untuk keluarga di rumah, mengingat hasil kerja suami tidak setiap bulan dapat dikirimkan. Meski demikian, kaum perempuan terlihat tegar dalam menjalani dan menghadapi peran gandanya. Karena itu, dipandang menarik mencermati fenomena kemiskinan yang dialami keluarga buruh perkebunan di PTPN X Ajung Kabupaten Jember.

Di tengah berbagai problema kerumitan hidup, ternyata kaum perempuan dari keluarga buruh di perkebunan PTPN X Ajung Kabupaten Jember mampu tampil sebagai subjek utama dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya. Yang menjadi permasalahan adalah: (1) bagaimana perilaku kaum perempuan keluarga buruh perkebunan di PTPN X Ajung Kabupaten Jember yang berlatar etnik Jawa dan Madura dalam merespons persoalan kemiskinan yang dihadapi keluarganya; (2) bagaimana kaum perempuan keluarga buruh perkebunan di PTPN X

Ajung Kabupaten Jember yang berlatar etnik Jawa dan Madura membangun aneka siasat lokal untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya itu; (3) bagaimana kaum perempuan keluarga buruh perkebunan di PTPN X Ajung Kabupaten Jember yang berlatar etnik Jawa dan Madura tersebut mengatasi problema identitas diri “sebagai perempuan” dalam ranah kehidupan keluarga (domestik) dan ranah kehidupan sosial (publik); dan (4) bagaimana potensi *survival strategic* yang dikonstruksi kaum perempuan keluarga buruh perkebunan di PTPN X Ajung Kabupaten Jember yang beretnik Jawa dan Madura dapat didayagunakan sebagai modal sosial bagi proses pemberdayaan keluarga miskin perkebunan berbasis gender dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini mendeskripsikan pola perilaku, strategi, dan potensi dari perempuan buruh perkebunan di PTPN X Ajung Kabupaten Jember dalam merespons kemiskinan. Hasil penelitian memperkaya paradigma konstruktivisme yang dasar pengetahuannya diperoleh secara langsung dari rakyat atau masyarakat (*people knowledge*). Secara praktis, hasil penelitian dapat sebagai masukan pengambilan kebijakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam merancang dan melaksanakan pembangunan di pedesaan. Bagi aktivis dan lembaga yang *concern* dalam gerakan pembelaan kesetaraan gender dapat digunakan sebagai bahan masukan ilmiah untuk kepentingan pemberdayaan perempuan di desa. Bagi perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pengkajian dan aksi pemberdayaan yang diorientasikan pada pembelaan perempuan desa.

B. Tinjauan Pustaka

Studi tentang dinamika masyarakat desa dalam merespons problema kemiskinan sudah banyak dilakukan para ahli, baik dari dalam maupun luar negeri. Lingkup kajiannya ada yang global, nasional, dan lokal. Di antara

hasil studi yang cukup populer dan banyak dijadikan rujukan antara lain, *The Moral Economy of Peasant* terbitan New Haven: Yale University Press (1976) dan *Perlawanan Kaum Tani* dialihbahasakan Budi Kusworo dan diterbitkan Yayasan Obor, Jakarta (1993), keduanya karya James C. Scott. Kedua buku ini banyak menyoroti persoalan perlawanan kaum tani dari perspektif moral ekonomi. Kajian serupa dengan pendekatan yang sama juga dilakukan E.J Wolf dalam bukunya berjudul *Peasant Wars of Twentieth Century*, (1969) New York: Harper dan Rowy.

Secara umum, ketiga penulis tersebut menautkan gerakan perlawanan petani dengan ancaman terhadap subsistensi atau keamanan kesejahteraan mereka selama periode perubahan berlangsung. Gerakan petani dianggap sebagai reaksi definitif terhadap penetrasi kapitalis untuk melindungi struktur sosial ekonomi prakapitalis yang mereka miliki yang secara nyata telah memberikan kesejahteraan dan ketenteraman kepada mereka. Masuknya kapitalisme pada komunitas mereka ditentang keras, karena selain dianggap mengancam kepentingan ekonomi mereka, juga dianggap akan mengancam pranata-pranata sosial budaya yang mereka miliki. Menurut Wolf (1969:280) "*Capitalism turns land, labor, and wealth into commodities, and this is only a shorthand formula for the liquidation of encumbering social and cultural institutions.*"

James C. Scott melihat bahwa petani menganut gaya hidup gotong-royong, tolong-menolong, dan melihat persoalan secara kolektif. Sikap demikian disebabkan struktur kehidupan yang terjepit dan harus menyelamatkan diri. Selain itu, para petani juga menganut azas pemerataan, dengan pengertian membagikan secara sama rata apa yang terdapat di desa, karena mereka percaya kepada hak moral para petani untuk dapat hidup secara cukup. Karena itu, intensifikasi pertanian dan komersialisasi hasil-hasil agraria dianggap sebagai ancaman oleh para petani. Dalam hal ini Scott (1976) mengatakan

"Because capitalism, commercialization of agrarian relations and the centralizing state out through the infringement of subsistence customs and traditional social rights to replace them with contract, the market and uniform laws."

Ipong Azhar dalam bukunya *Radikalisasi Petani Masa Orde Baru: Kasus Sengketa Tanah Jenggawah* (1999) terbitan Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia, juga sangat terpengaruh teori moral ekonomi. Dalam mengomentari pendapat Scott, Azhar (1999:16-24) menjelaskan bahwa moralitas mendahulukan keselamatan menjadi faktor kunci pendekatan moral ekonomi dalam menjelaskan gerakan perlawanan petani. Prinsip mendahulukan keselamatan merupakan sumber kekuatan moral yang memungkinkan para petani menolak perubahan dan siap melakukan perlawanan bila mereka dihadapkan pada kenyataan yang tidak memberikan pilihan lain. Gerakan perlawanan yang dilakukan petani tersebut beragam, mulai dari tindakan menciptakan pasar-pasar gelap dan mereka hanya menjual hasil pertaniannya ke pasar gelap ini, mengurangi kapasitas produksi, sampai pada tindakan meninggalkan tanah pertanian dan bermigrasi ke kota.

Popkin dalam bukunya yang berjudul *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*, memiliki perspektif berbeda dengan yang digunakan Scott maupun Wolf. Menurut Popkin, semua bentuk perlawanan petani bukan untuk menentang *Revolusi Hijau* atau melawan perubahan, tetapi untuk menentang kekuasaan para elit desa, petani kaya, yang mengatasmakan komunitas tradisional demi mempertahankan institusi yang lebih menguntungkan mereka dan menghimpit kehidupan petani miskin.

Bagi Popkin, Revolusi Hijau telah banyak membawa dampak positif bagi Asia daripada dampak negatif. Ia menolak anggapan bahwa Revolusi Hijau menyebabkan petani meninggalkan desa dan menuju kota yang mengakibatkan naiknya pengangguran di kota serta tumbuhnya kelompok miskin di kota.

Melalui perspektif Ekonomi Politik, Popkin mengemukakan bahwa gerakan petani terjadi ketika sebagian besar individu merasa dirugikan dan setelah melakukan tawar-menawar, mereka bersepakat melakukan perlawanan. Dalam konteks ini Popkin (1979:258) mengatakan "*Collective action require more than consensus or even intensity of need. It requires conditions under which peasant will find it in their individual interest to allocate resources to their common interest.*"

Sementara itu, hasil penelitian Sartono Kartodirdjo dalam bukunya yang berjudul *Protest Movement in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Century* (1973) Singapore: Oxford University Press dan hasil studi Kuntowijoyo berjudul *Radikalisasi Petani* (1993) Yogyakarta: Bentang Intervis Utama, terdapat nuansa persepektif lain dalam memahami aksi protes atau gerakan resistensi petani. Kedua buku tersebut lebih menekankan aspek historis dalam menjelaskan gerakan petani. Menurut Kartodirdjo, gerakan perlawanan petani, khususnya di Jawa, sangat terkait dengan ideologi yang disebut *Milenarisme* dalam bentuk *Ratu Adilisme*. Hal senada dikemukakan Michael Adas dalam bukunya *Ratu Adil: Tokoh dan Gerakan Milenarian Menentang Kolonialisme Eropa* (1988), bahwa gerakan perlawanan petani dikaitkan dengan ideologi *Revitalisme* menuju *Milenarisme*. Beberapa ideologi yang selama ini memengaruhi gerakan rakyat pedesaan antara lain: *Milenarisme*, *Eschatologisme*, *Mesianisme*, *Perang Jihad*, dan *Revivalisme*. Sementara Kuntowijoyo, melihat gerakan perlawanan petani terkait dengan ideologi kelas.

Secara umum, kepustakaan di atas berbicara mengenai reaksi masyarakat desa yang mayoritas petani ketika dihadapkan pada problema sosial, ekonomi, dan politik. Perbedaan yang mencolok, terletak pada cara pandang, perspektif atau pendekatan yang digunakan. Wolf dan Scott lebih mengedepankan pendekatan moral ekonomi, Popkin cenderung menggunakan perspektif ekonomi politik,

sedangkan Kartodirdjo dan Kuntowijoyo lebih mengedepankan perspektif historik. Secara umum, kajian-kajian di atas dengan perspektifnya masing-masing dapat dikatakan belum banyak memasukkan analisis gender dalam kerangka analisis kajiannya.

Penelitian ini mengkaji dinamika petani di pedesaan dalam menghadapi kemiskinan. Berbeda dengan beberapa hasil kajian di atas yang menyoroti petani sebagai aktor sosial secara umum, penelitian ini lebih fokus ke gerak sosial petani desa yang berjenis kelamin perempuan. Karena itu, dalam penelitian ini nuansa gender tampak lebih dominan. Meski, harus diakui sangat dimungkinkan ada kajian-kajian yang secara spesifik telah mengkaji peran perempuan desa dalam merespons kemiskinan di pedesaan, namun sangat dimungkinan perspektif maupun konstruksi teoretis yang digunakan berbeda.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengkaji realitas sosial berupa pola tindakan perempuan miskin keluarga buruh perkebunan di PTPN X Ajung Kabupaten Jember dalam menghadapi kemiskinan adalah metode kualitatif (*qualitative approach*) yang bertolak dari paradigma konstruktivisme. Paradigma ini dipilih karena titik tolak penelitian ini bukan sekedar mengkaji pola tindakan sosial yang diartikulasikan perempuan secara verbalistik dan pola tindakan perempuan desa tidak sebatas dimengerti sebagai realitas objektif di alam inderawi yang *quantifiable*, melainkan sebagai makna-makna (yang terinterpretasi dari berbagai simbol kultural), yang eksis bukan dalam simbol-simbol itu, melainkan di alam kesadaran dan kepehaman manusia yang tidak selamanya dapat termanifestasikan secara sempurna di alam inderawi (Wignjosoebroto, 2000:3, 2001:20-21).

Penelitian ini memilih di PTPN X Ajung Kabupaten Jember sebagai daerah penelitian atas pertimbangan: pertama, yang diteliti adalah buruh perempuan; kedua,

Kabupaten Jember terkenal dengan komoditi perkebunannya, yang salah satunya PTPN X Ajung dengan komoditi tembakau.

Proses penggalan data dilakukan dengan cara kuantitatif dan kualitatif. Penggalan data secara kuantitatif melalui questioner. Langkah-langkah penggalan dan analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, peneliti terjun ke lapangan melakukan pemetaan kawasan. Kedua, peneliti menyebarkan angket sekaligus melakukan identifikasi untuk mendapatkan gambaran umum mengenai potret buruh perkebunan di PTPN X Ajung didasarkan etnisitas, problema kemiskinan yang dihadapi, dan strategi buruh perkebunan berdasarkan etnisitasnya dalam merespons kemiskinan. Ketiga, hasil pemetaan berdasarkan data kuantitatif kemudian digunakan untuk memilih informan dan penggalan data lebih mendalam melalui observasi dan wawancara mendalam. Keempat, peneliti melakukan refleksi secara *ajeg* atas hasil interaksi dan pengamatan *on going* serta hasil dialog/wawancara yang diperoleh. Dalam konteks inilah, siklus interaksi, observasi *on going*, dan refleksi-kritis dijadikan sebagai teknik penggalan dan pemaknaan atas data yang diperoleh. Analisis yang digunakan peneliti cenderung lebih banyak berproses melalui cara-cara partisipatif (Wignjosebroto, 2001:22). Kelima, peneliti melakukan rekonstruksi model yang *applicable* bagi implementasi program-program pemberdayaan masyarakat miskin perkebunan berbasis gender dengan menggunakan metodologi riset aksi partisipatoris.

D. Profil Perempuan Buruh Perkebunan Tembakau di PTPN X Ajung Kabupaten Jember

1. Sekilas PTPN X Ajung Kabupaten Jember

Secara administratif, perkebunan PTPN X masuk ke dalam wilayah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Kawasan perkebunan PTPN X Ajung berada di areal dataran rendah. Jarak perkebunan dengan kota Kecamatan

Ajung dan ibu kota Kabupaten Jember relatif dekat dengan sarana transportasi yang mudah pula. Jarak tempuh dari pusat kota Kecamatan Ajung ke areal perkebunan memakan waktu sekitar 15 menit. Menilik jarak desa yang cukup dekat dari pusat kota kecamatan dan kabupaten, tidak heran jika akses penduduk desa ini terhadap sarana informasi, komunikasi, transportasi, penerangan, pendidikan, dan kesehatan, juga relatif memadai.

Di PTPN X Ajung ini para pekerjanya tidak dilokalisasi dalam satu perkampungan Afdeling yang menjadi tempat tinggal atau hunian para pekerja buruh perkebunan. Para buruh perkebunan yang berasal dari masyarakat sekitar datang dan pulang dari dan ke rumah masing-masing. Para buruh perkebunan tidak mendapatkan fasilitas tempat tinggal, sarana penerangan berupa listrik, dan kebutuhan air sebagaimana kondisi buruh perkebunan di kawasan Afdeling. Karena itu, dapat dipahami jika kondisi kehidupan sosial di pemukiman ini sangat berbeda dengan kondisi sosial di pemukiman buruh di kawasan Afdeling. Kalau di pemukiman desa atau perkampungan, warga memiliki kebebasan dan otonomi yang relatif luas, di kawasan Afdeling kebebasan dan otonomi warga tidak akan sebesar warga desa biasa.

2. Potret Perempuan Buruh Tembakau di PTPN X Ajung dan Problema Kemiskinan yang Membelenggunya

Sebagaimana di kawasan perkebunan PTPN di daerah lain, para pekerja perempuan buruh PTPN X Ajung secara etnisitas juga terdiri atas etnik Madura dan Jawa. Segregasi sosial perempuan buruh perkebunan PTPN X Ajung ini etnik Jawa lebih besar dibandingkan dengan etnik Madura dengan perbandingan Madura (38%) dan Jawa (62%). Jika menilik interaksi sosial dan percampuran yang telah berlangsung lama di antara kedua etnik tersebut, para informan sulit mengidentifikasi diri sebagai murni beretnik Madura dan Jawa. Apalagi dalam satu keluarga telah terjadi pembauran antara kedua etnik tersebut sebagai

akibat adanya perkawinan, anak-anak mereka pun mengidentifikasi sebagai orang Jember yang beretnik campuran.

Mencermati kehidupan perempuan miskin buruh PTPN X Ajung, yang tampak di permukaan adalah sosok perempuan *ndeso*, *kampungan* dan tidak melek huruf (*uneducated*)—sebuah representasi simbolik kalangan kelas rendah yang kurang terdidik, berpenampilan ala kadarnya, dan berpakaian jauh dari modis—yang bekerja di sektor-sektor informal pedesaan sebagai pekerja kasar. Sebagai gambaran, rata-rata pendidikan kaum perempuan buruh perkebunan (Madura: tidak tamat SD 10%, tamat SD 10% dan tamat SMP 80%; Jawa tidak pernah sekolah 25%, tidak tamat SD 6.25%, tamat SD 31.25%, dan tamat SMP 37,5%). Dalam sektor pendidikan ini tidak ada perbedaan mencolok antara Madura dan Jawa. Hanya saja di lingkungan perempuan buruh perkebunan dari Jawa terdapat persentase relatif besar terkait dengan buruh yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal sebesar 25%.

Dalam kesehariannya, kaum perempuan buruh PTPN X Ajung selalu berkuat dengan kerja keras baik di sektor domestik maupun nondomestik. Hampir tidak ada waktu senggang untuk bersantai, apalagi bersolek. Pagi hari sudah sibuk dengan urusan dapur, mengurus anak dan suami, serta keperluan rumah, tidak berselang lama bekerja di luar rumah sebagai buruh kebun sampai sore hari, dan malamnya pun sibuk dengan pekerjaan domestik. Setelah maghrib atau isyak, mereka memang masih menyempatkan diri berkumpul dengan sesama kaum perempuan yang tergabung dalam jama'ah *muslimatan* atau pengajian.

Gerak kehidupan sehari-hari perempuan miskin seolah mengalir begitu saja, tanpa banyak menyimpan persoalan. Tetapi, setelah dicermati secara seksama, tampak betapa mereka hidup dalam kesulitan atau kesengsaraan dan memikul beban ganda. Kesulitan hidup yang mereka alami adalah persoalan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari,

terutama kebutuhan primer (pangan, sandang, dan papan). Urusan menanggung beban berat kehidupan keluarga bukan monopoli kaum perempuan saja, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Namun, kaum perempuanlah yang terkena beban paling berat dalam memikul problema kemiskinan keluarga, dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Fakta kemiskinan pada keluarga miskin yang menempatkan kaum perempuan sebagai pihak yang paling besar terkena dampaknya, bukanlah sebuah fakta tunggal yang tidak memiliki keterkaitan relasional yang bercorak kultural, sosial, dan politik. Sebagai realitas sosial, kemiskinan yang mendera kaum perempuan tidak bisa dilepaskan dari keterasingannya dengan berbagai relasi kuasa yang ada di sekitarnya. Secara ekonomi, kemiskinan selalu dicirikan dengan keterbatasan kaum perempuan dalam memenuhi kebutuhan material keluarga. Meski secara verbal tidak sedikit kaum perempuan buruh PTPN X Ajung baik Madura maupun Jawa enggan menganggap dirinya sebagai keluarga miskin, namun mereka mengakui bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selalu dihadapkan pada kesulitan. Gambaran mengenai persepsi diri tentang kemiskinan kalangan buruh beretnik Madura 30% mengidentifikasi dirinya miskin, 60% mengidentifikasi tidak miskin, dan 10% menjawab tidak tahu. Sementara itu, buruh dari etnik Jawa mengidentifikasi diri miskin sebesar 43,75%, tidak miskin 37,5% dan tidak tahu sebesar 18,75%.

Satu fenomena yang cukup menarik, kaum perempuan buruh PTPN X Ajung memahami bahwa kemiskinan dirinya itu terkait dengan keyakinan teologis mereka berupa takdir (ketentuan dari Yang Mahakuasa). Dari kalangan perempuan Madura yang memahami kemiskinan sebagai takdir sebanyak 30%, bukan takdir 20% dan tidak tahu 50%. Sementara perempuan buruh dari Jawa memahami kemiskinan sebagai takdir sebanyak 43,75%, bukan takdir sebesar 37,5%

dan tidak tahu 18,75%. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara Madura dan Jawa terkait persepsi kemiskinan korelasinya dengan persoalan teologis.

Keterbatasan dan minimnya kemampuan yang dimiliki kaum perempuan buruh PTPN X Ajung juga berelasi dengan kekuatan-kekuatan sosial-ekonomi dominatif di luar dirinya yang membuatnya tidak memiliki ruang akses lebih luas seperti pasar, negara, dan berbagai institusi terkait. Keterbatasan perempuan dalam mengakses pekerjaan yang layak berkorelasi dengan kebijakan negara yang mensyaratkan berbagai aturan, antara lain kompetensi, *skill*, dan profesionalisme berdasarkan pendidikan, atau bisa juga pasar yang cenderung dimonopoli kelas sosial berkekuatan modal, sehingga menutup akses bagi mereka yang tidak cukup memiliki kekuatan modal. Keterbatasan perempuan secara politik dicirikan oleh kemampuannya yang rapuh dalam berpartisipasi dan memengaruhi kebijakan publik, atau melakukan negosiasi dengan pemegang kekuasaan yang salah satunya adalah negara (pemerintah) dan pihak PTPN. Secara normatif, kaum perempuan memang tidak banyak mengaitkan persoalan kemiskinan yang dialaminya dengan kebijakan negara ataupun pasar (PTPN) terbukti dalam menjawab angket kaum perempuan dari etnik Madura yang menjawab tidak ada kaitan antara keduanya sebanyak 10% dan sisanya 90% lebih banyak menjawab tidak tahu, sedangkan dari Jawa yang menjawab tidak ada kaitan sebesar 6,25%, yang menjawab ada hubungannya sebesar 6,25% dan yang menjawab tidak tahu 87,5%.

Kemiskinan yang mendera kaum perempuan tidak saja berelasi dengan pusat kekuasaan bernama institusi atau korporasi tanpa identitas gender. Institusi-institusi sosial tersebut, mulai dari negara, korporasi, pasar sampai unit terkecil bernama keluarga, ternyata juga berdimensi gender. Salah satu ciri yang barangkali masih melekat kuat dalam sistem kelembagaan sosial di pedesaan adalah coraknya yang masih sangat

feodalistik-patriarkhis. Sebagaimana dimaklumi, struktur sosial buruh perkebunan yang bertempat tinggal di kawasan pedesaan prakolonialisme dicirikan oleh kuatnya nilai-nilai feodalisme produk kerajaan. Meskipun Ajung jauh dari pusat kekuasaan kerajaan-kerajaan Jawa saat itu, nilai feodalisme masih terasa kuat mewarnai sistem sosial-budaya masyarakat setempat. Terlebih, mayoritas warga Ajung adalah pendatang dari Jawa yang terpengaruh budaya kerajaan, dan Madura yang terpengaruh oleh hubungan *patron-client* yang berakar dari nilai-nilai lokal. Walaupun budaya tegalan (Madura) dinilai lebih demokratis atau terbuka dibandingkan dengan tradisi sawahan (Jawa), dalam sistem sosial dari kedua budaya besar tersebut masih sarat dengan nilai-nilai feodalisme. Salah satu nilai feodalisme yang menonjol adalah kuatnya peran laki-laki dibandingkan dengan peran kaum perempuan yang sebatas diposisikan sebagai *kanca wingking*.

Seiring dengan kedatangan kaum kolonial Belanda, budaya feodalisme-patriarkhis tersebut diinstitutionalisasi ke dalam sebuah sistem sosial baru yang mereka produk yakni kolonialisme. Pada era kolonialisme, stratifikasi sosial dan ekonomi di pedesaan, termasuk Ajung, semakin dipertajam. Dinamika sosial pun kemudian secara mudah dapat dikenali dari gerak strata kelas yang berbeda, yakni strata kelas tuan tanah, pemilik modal, *ambteenaar* (priyayi) terdiri atas kalangan elit Belanda dan elit pribumi dengan kalangan kelas rendahan (*wong cilik*), yaitu- para petani kecil. Hubungan sosial yang terlembagakan pun tidak sekedar feodalistik-patriarkhis, melainkan sangat dominatif, hegemonik, dan eksploitatif. Penduduk desa dari kalangan kelas rendahan saat itu tidak lebih diderivasi sekedar menjadi alat produksi kaum kolonial untuk menghasilkan barang-barang produksi sekaligus konsumsi bagi pasar Eropa.

Begitu lama sistem sosial warisan kolonial Belanda itu tertanam, menjadikan keberadaannya sampai pascakolonialisme usai pun,

masih tumbuh dan berkembang. Pemerintahan Orde Baru disebut-sebut, bukan sekedar menghidupkan karena kenyataannya memang masih hidup di tengah-tengah masyarakat, memperkuat sistem sosial feodalistik ini sebagai instrumen politik untuk menata kehidupan masyarakat sehingga mudah untuk dikendalikan atau dikontrol sesuai dengan selera pemerintah. Di pedesaan seperti Ajung, tuan tanah atau penguasa lahanlah yang kemudian berperan besar dalam melakukan kontrol terhadap kehidupan kelas sosial rendah. Ada satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa struktur pedesaan di Ajung yang ditandai oleh strata sosial, kaya-miskin, tuan tanah-penyewa, majikan-buruh, memang benar adanya. Tetapi, tidak kemudian gambaran stratifikasi kelas itu sama persis dengan gambaran kelas sebagaimana yang dipikirkan Marx. Mengikuti pandangan Hefner, Peluso, Scott dan juga Kuntowijoyo (1993), tatanan kehidupan di pedesaan, khususnya di Asia Tenggara, membentuk suatu struktur menyerupai sebuah mosaik yang saling bersinggungan, bertempelan, kait-mengait, dan saling memengaruhi, dalam relasi kultural, ekonomi dan moral.

Hubungan antara kelas sosial kaya dengan kelas sosial miskin, dalam sebuah struktur ekonomi desa, terkadang tidak seratus persen berupa hegemoni tanpa nurani, atau kebengisan-kebengisan, sebagaimana dilukiskan Zola. Petani dan masyarakat desa yang berada di kelas-kelas bawah bahunya telah menjadi keras karena pukulan cambuk, jiwanya sudah sedemikian hancur, sehingga tidak lagi mengenal kemerosotan dirinya. Bagi Hefner maupun Scott, perbedaan-perbedaan kelas tersebut bukanlah titik-titik rawan yang setiap saat bisa membangkitkan amarah dan perlawanan kolektif masyarakat pedesaan. Tidak jarang, prinsip-prinsip kelas menjadi kabur, kalah bersaing dengan ikatan-ikatan keagamaan, kultural, persahabatan, faksi-faksi politik dan patronase. Dalam hal ini bahasa-bahasa rasionalisme kelas gagal menangkap kekhususan moral kehidupan pedesaan.

Untuk kasus perempuan buruh PTPN X Ajung, relasi kuasa yang terbangun antara pemilik dan penguasa lahan (pertanian dan perkebunan) yang didominasi ideologi patriarkhisme dengan petani kecil (petani pekerja, buruh kebun, dan pekerja di sektor informal *off farm* lain), dapat diidentifikasi sebagai salah satu pilar relasi sosial yang menempatkan kaum perempuan sebagai subjek yang ter-subordinasikan, yang berperan besar dalam mendomestikasikan kaum perempuan dalam sangkar hegemoni bernama kemiskinan. Konsekuensinya, kaum perempuan menerima beban dan tanggung jawab besar dalam menjaga kelangsungan hidup keluarga. Tidak jarang pula, perjalanan hidup kaum perempuan dalam mengawal kelangsungan hidup keluarganya diwarnai berbagai tragedi yang tidak mengenakkan. Di lingkungan sosial buruh perkebunan PTPN X Ajung sendiri, cerita tentang kemiskinan banyak diwarnai aneka peristiwa memilukan seperti kelaparan (walau tidak sampai mengarah pada busung lapar), pengangguran, *trafficking*, sampai tragedi kematian ibu dan anak. Tingkat kematian terutama bayi dan anak-anak –meski belum dilakukan survei mendalam– dapat dikatakan sangat tinggi. Cerita Bu Ilmiyati, salah seorang buruh perkebunan yang telah bekerja selama 15 tahun lebih dan sudah kawin sejak usia 12 tahun, telah mengandung serta melahirkan anak sebanyak empat kali, namun yang bisa bertahan hidup hanya satu. Hal itu, sebagai representasi betapa kematian sangat dekat dengan keluarga miskin, yang secara langsung bersinggungan dengan keberadaan kaum perempuan.

Penetrasi kemiskinan menyebabkan kaum perempuan harus bekerja keras, memikul beban ganda keluarga, dan harus merelakan suami atau salah satu anggota keluarganya melakukan migrasi untuk mencari kerja di kota atau daerah yang lebih maju secara ekonomi. Meski bukan pilihan mengenakkan, karena harus berpisah dengan suami, migrasi dipandang sebagai pilihan tindakan paling rasional sebagai strategi untuk dapat

memperpanjang nafas kehidupan keluarga. Mereka sadar, ruang untuk bercocok tanam, peluang untuk bekerja lebih baik, dan kemungkinan memperbaiki nasib, tidak bisa dipenuhi dengan mengandalkan sumberdaya ekonomi di perkebunan atau desanya sendiri. Terlebih, sumberdaya ekonomi strategis tidak bisa berpihak kepada mereka. Pilihan migrasi yang dilakukan keluarga miskin itu, tidak bisa dilepaskan dari tekanan sistem kehidupan sosial dominatif yang digerakkan oleh tangan-tangan kekuasaan bernama kapitalisme yang mewujud dalam bentuk pasar, negara, dan aparatus kapitalisme lokal maupun global.

3. Pola Perilaku dan Strategi Perempuan Buruh PTPN X Ajung dalam Merespons Kemiskinan

Fenomena paling mencolok yang dapat diamati dari gerak ekonomi perempuan miskin buruh PTPN X Ajung adalah kerja keras yang menjurus ke arah –meminjam istilah James Scott– eksploitasi diri (*self exploitation*). Sebagian besar dari mereka tidak pasrah menerima takdir kemiskinan yang dihadapinya. Mereka memiliki keyakinan dan optimisme untuk dapat keluar dari belenggu kemiskinan. Data statistik menunjukkan bahwa sebagian besar kaum perempuan beretnik Madura tidak pasrah dan menerima secara *taken for granted* kondisi kemiskinan keluarganya (30%), menerima tetapi tetap bekerja keras (20%) dan menjawab tidak tahu (50%). Demikian pula halnya dengan kaum perempuan Jawa yang tidak pasrah menghadapi kemiskinan sebanyak (37,5%), pasrah namun tetap bekerja keras (18,75%) dan menjawab tidak tahu (37,5%).

Kapasitasnya sebagai *wong cilik* yang hidup di lingkungan agraris, kerja keras yang dilakukan kaum perempuan buruh perkebunan PTPN X Ajung tidak jauh dari sektor-sektor pekerjaan yang tersedia di sekitar perkebunan dan pedesaan tempat mereka menetap. Sebagian dari mereka –terutama yang masih memiliki lahan garap– di samping tetap bekerja sebagai buruh kebun, mereka juga

mengelola lahan garap (*land operation*) yang dimilikinya sebagai sumber ekonomi rumah tangga. Kaum perempuan yang memiliki lahan kering (berupa tegal) memanfaatkan lahan untuk ditanami aneka tanaman subsisten dan sekaligus bercorak ekonomi pasar dengan jenis utama antara lain jagung, singkong, kopi, serta beberapa tanaman subtropis. Mereka yang tinggal di dataran rendah dengan kondisi lahan basah (sawah) menanam lahannya dengan jenis tanaman padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, dan sebagainya. Di samping itu, mereka juga beternak, berdagang kecil-kecilan, dan melakukan usaha serabutan lainnya. Meski secara teoretis aneka usaha kecil itu banyak dipandang kurang efisien dan produktif, bagi perempuan buruh, hal itu merupakan salah satu cara penting untuk mempertahankan hidup, atau lebih dikenal dengan sebutan strategi *survival*, beberapa ahli ada yang menyebut sebagai *Copping Mechanism*.

Keberadaan perkebunan, tanah (lahan garap) dan gerak ekonomi perempuan miskin PTPN X Ajung masih memiliki jalinan kuat. Meski di kawasan jalur utama pedesaan, gerak ekonomi perempuan mulai terdeferensiasi ke dalam berbagai pekerjaan di sektor jasa dan perdagangan (*off farm*). Secara umum gerak ekonomi perempuan buruh PTPN X Ajung masih banyak berhubungan dengan lahan pertanian dan perkebunan. Mereka masih terlibat penuh –di samping kerja-kerja perkebunan– dalam proses pengelolaan lahan pertanian, sebelum tanam dan pengelolaan pasca panen. Pengelolaan lahan dan kerja-kerja serabutan lainnya dilakukan sendiri oleh kaum perempuan dengan tetap melibatkan peran anggota keluarga.

Sementara itu, bagi kaum perempuan buruh perkebunan PTPN X Ajung yang hanya mengandalkan kerja di perkebunan, hampir tidak punya lahan garap dan memiliki ketergantungan dengan tanah baik pertanian ataupun perkebunan. Kenyataannya, jumlah perempuan tuna lahan bisa mencapai 60%.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka melakukan kerja keras di sektor perkebunan, menjadi petani pekerja atau buruh tani, petani penggarap, pedagang *kelontong*, buruh/pembantu rumah tangga, dan berbagai kerja di lapangan *off farm activities*.

Persamaan yang dialami oleh perempuan miskin buruh PTPN X Ajung baik yang beretnik Madura maupun Jawa dengan kapasitas kepemilikan/penguasaan lahan sempit dan tuna lahan garap, dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga kelangsungan hidup keluarga, adalah bahwa mereka sama-sama tidak sekedar menggantungkan satu sektor usaha saja, yakni sektor perkebunan. Bagi perempuan petani kecil, di samping bekerja mengelola lahan pertanian, mereka juga melakukan pekerjaan tambahan terutama di sektor *off farm activities*. Tidak jauh beda dengan perempuan miskin tuna lahan, mereka juga melakukan kerja ganda, terkait kerja ber-corak domestik dan nondomestik. Di ranah nondomestik sekalipun, mereka melakukan kerja ganda, pagi bekerja sebagai buruh tani atau perkebunan, siang dan sore harinya bekerja serabutan atau kerja sebagai buruh rumah tangga. Biasanya, kaum perempuan membuat distribusi peran terhadap anggota keluarga yang masih tinggal di desa. Ada yang diberi tugas bekerja di sektor pertanian dan ada pula yang diberi peran bekerja di luar sektor pertanian. Semua itu dilakukan agar kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi dan kelangsungan hidup keluarganya terjaga dengan baik.

Kehidupan sosial perempuan buruh perkebunan PTPN X Ajung sebenarnya bukan tanpa ada stratifikasi sosial dan sekaligus kesenjangan sosial. Gerak kehidupan sosial di Ajung tidak luput pula dari diferensiasi sosial yang sering memunculkan kesenjangan terutama antara mereka yang berasal dari kelas sosial rendah (*wong cilik*) dengan mereka yang berasal dari kalangan atas (tuan tanah, pengelola perkebunan), dalam hal ini terepresentasikan pada diri penguasa lahan

perkebunan (PTPN X). Kesenjangan kelas sosial antara buruh perkebunan, dengan tuan tanah yang terepresentasikan pada diri penguasa lahan tidak sampai memunculkan gejolak sosial dari kalangan bawah dalam bentuk gerakan radikalisasi petani untuk memperebutkan dan menjarah lahan perkebunan dan kehutanan. Kalau pada abad XIX dan awal abad XX marak gerakan radikalisasi petani terutama di Jawa yang dilakukan petani kecil terhadap tuan tanah yang dimotori oleh elit-elit kota maupun desa, di kawasan Ajung tidak pernah terjadi peristiwa gerakan serupa. Usaha untuk membuat gerakan radikal secara luas saat itu telah dicoba oleh gerakan komunis, namun tidak cukup berhasil. Gerakan komunis melalui partai politik yang dibentuknya (PKI), dan diperkuat dengan sayap Gerwani yang mengusung isu utama *landreform* dengan cara menciptakan polarisasi penduduk desa menjadi dua kelas yang saling dipertentangkan, tuan tanah "setan desa" dan petani kecil, tidak sampai berhasil memicu gerakan radikalisme pedesaan, termasuk di kawasan Ajung.

Ketika fenomena radikalisasi petani –yang jugamelibatkan kaum perempuan di dalamnya– terjadi di beberapa daerah yang ada di wilayah Jember sebut di antaranya kasus Jenggawah, Ketajek, dan beberapa daerah lain, kawasan sekitar perkebunan PTPN X Ajung tetaplah tenang dan tidak mengalami pergolakan senada. Bahkan pada periode reformasi 1998, saat marak pembabatan hutan dan penjarahan areal perkebunan oleh masyarakat setempat tanpa terkendali, Ajung yang juga dikelilingi areal perkebunan, warganya tidak sampai terpengaruh untuk melakukan gerakan radikalisasi massa. Periode keterbukaan tidak dimanfaatkan komunitas miskin di Ajung untuk menuntut pihak perkebunan melakukan *land reform*, bersikeras melakukan reklamasi, dan meneriakkan tuntutan pembubaran sistem penyelenggaraan pengelolaan perkebunan berbasis negara, dengan alasan pemulihan hak mereka atas basis-basis material penopang kehidupan lokal.

Mengikuti pendapat Kuntowijoyo (1993), dapat diidentifikasi bahwa keberadaan tokoh lokal-kharismatik dengan corak kepemimpinan tradisional seperti kyai, yang tidak begitu saja merestui gerakan sosial yang bersifat destruktif, cara berpikir kaum perempuan buruh perkebunan dan warga masyarakat Ajung pada umumnya yang mayoritas dapat dikatakan masih tradisional, interaksi warga dengan jaringan NGO, organisasi sosial-keagamaan, dan partai politik, yang dapat dikatakan belum terjalin secara kuat, disertai beberapa elit desa-kota yang tidak cukup berhasil membangun solidaritas sosial baru yang lebih bersifat fungsional dan organis, sebagaimana kemampuan elit lokal di tempat lain, merupakan beberapa faktor yang mendasari ketidakhadiran gerakan radikalisme warga dan komunitas buruh perkebunan PTPN X Ajung dalam memperebutkan kapling tanah perkebunan sebagai strategi untuk mempertahankan dan mengubah nasib kehidupan mereka dengan cara perluasan penguasaan lahan. Satu hal yang tidak bisa dinafikan adalah kecenderungan warga yang mengedepankan pilihan politik akomodasi, dengan cara bersikap akomodatif dengan pengelola perkebunan, sembari melakukan gerakan personal kecil-kecilan seperti menanam pinggir areal perkebunan dengan tanaman konsumsi, merupakan pilihan warga miskin, terutama dari kalangan perempuan buruh perkebunan, dan tidak memilih gerakan radikal.

Walaupun tidak terjadi gerakan radikalisme di kalangan keluarga miskin, termasuk di dalamnya terdapat peran perempuan yang tidak bisa diabaikan, bukan berarti mereka sepakat terhadap polarisasi kelas sosial yang tidak berkeadilan. Hal itu bukan berarti kalangan miskin setuju terhadap pola relasi sosial dominatif yang mewarnai interaksi mereka sebagai *wong cilik* dengan pihak penguasa lahan sebagai kapitalis pedesaan. Bagi siapa pun hampir sulit untuk tidak melihat dimensi dominasi atau –meminjam

istilah Gramsci– hegemoni yang beroperasi di dalam sistem relasi sosial antara komunitas miskin dengan pihak penguasa lahan perkebunan. Pembuatan segala macam bentuk aturan seperti pemberian upah yang sangat minim, tidak adanya jaminan kesejahteraan bagi para pekerja, dan larangan untuk memprotes berbagai aturan perusahaan. Kalau tidak sepakat para pekerja dipersilakan keluar dari pekerjaan di sektor perkebunan, sebagai misal, merupakan bentuk-bentuk hegemoni yang memengaruhi jalannya relasi sosial antara kedua belah pihak. Kondisi semacam ini, boleh jadi, yang turut berperan menekan komunitas miskin buruh perkebunan PTPN X Ajung, yang seolah tunduk patuh menerima aturan tanpa *reserve* dan tidak mau berbuat macam-macam terlebih lagi bergerak untuk melakukan tindakan radikalisme.

Pandangan mengenai kuatnya hegemoni yang dikonstruksi pihak penguasa perkebunan sehingga dapat menjadikan komunitas miskin di sekitarnya tidak berdaya sama sekali, tidak sepenuhnya dapat dipandang benar atau sesuai dengan kenyataan di lapangan sebagaimana di Ajung. Meskipun di Ajung tidak sampai terjadi gejolak sosial apalagi dalam bentuk yang paling ekstrem berupa gerakan radikalisme massa, hal itu bukan berarti tidak terjadi gerakan perlawanan (sebagai penanda ketidaksepakatan) yang dilakukan komunitas miskin, termasuk dari kalangan perempuan terhadap berbagai bentuk pranata sosial yang dinilai dominatif tersebut. Terkait dengan hal itu, kaum perempuan dari keluarga miskin memiliki pandangan yang tidak sepenuhnya positif terhadap para penguasa lahan. Mereka memang telah memberikan kesempatan untuk bekerja di perkebunan, namun mereka tidak memberikan perhatian serius terhadap nasib para pekerjanya. Dihadapkan pada situasi demikian itu, sebagai siasatnya kaum perempuan tidak melakukan gerakan frontal, melainkan menggunakan siasat yang terlihat akomodatif tetapi secara substansial tetap resisten. Mereka tetap bekerja di perkebunan,

tetapi sekaligus juga memanfaatkan tanah perkebunan dengan cara mengapling sebidang lahan kecil untuk ditanami berbagai tanaman subsisten seperti pisang, ketela pohon, dan semacamnya.

Lebih lanjut, kaum perempuan juga melakukan gerakan kecil-kecilan seperti mengambil kayu bakar, mengambil sebagian hasil perkebunan dari perkebunan milik PTPN X. Menilik gerakan-gerakan kecil yang dilakukan kaum perempuan miskin, tidak disangsikan, bahwa telah terjadi perlawanan secara simbolik, kultural, dan sosial sebagai strategi yang mereka pergunakan untuk melakukan *counter* atau -meminjam istilah Scott- aksi protes terhadap berbagai hal yang dipromosikan oleh kalangan suprastruktur. Aksi kecil-kecilan yang dilakukan kaum perempuan buruh perkebunan PTPN X Ajung tersebut sekaligus berfungsi sebagai senjata untuk mempertahankan kelangsungan hidup di tengah kekuatan dominan yang serba represif. Jadi, hegemoni yang turut menciptakan kepasifan di kalangan bawah yang dihegemoni dapat dikatakan sebagai suatu kelaziman. Akan tetapi, kalau hegemoni kemudian dipandang telah menjadikan komunitas miskin tidak berdaya sama sekali tanpa memiliki kekuatan untuk resisten meski dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun, dapat dikatakan sangat keliru.

Sebagai strategi alternatif dalam mempertahankan kelangsungan hidup, kaum perempuan juga mengandalkan hutang atau pinjaman yang diperoleh dengan menggunakan sistem tradisional seperti jaringan kekeluargaan, kekerabatan, dan persaudaraan. Hal itu menjadi strategi ampuh mereka guna mempertahankan kelangsungan hidup keluarga. Dapat dipastikan, tanpa mekanisme hutang berdasar kekeluargaan (hutang tanpa bunga), usaha kaum perempuan miskin buruh perkebunan PTPN X Ajung dalam mempertahankan kelangsungan hidup akan lebih berat. Kasus Bu As, misalnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ia

mendapatkan akses hutang dalam bentuk uang dan sembako utamanya dari warung sebelah rumah milik saudaranya. Jaminan pelunasan hutang disandarkan pada hasil upah mingguan sebagai buruh perkebunan. Jika tidak ada nilai tradisional yang masih melekat dalam lingkungan masyarakat desa ini, dapat dipastikan, akses hutang baik berupa uang maupun kebutuhan bahan pokok sulit terwujud. Dalam konteks ini, terlihat jelas betapa moral subsistensi di komunitas perempuan buruh perkebunan PTPN X Ajung masih bisa didayagunakan sebagai *social capital* bagi keluarga miskin dalam mempertahankan kelangsungan hidup mereka.

E. Simpulan

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pola perilaku perempuan buruh perkebunan dalam merespons problema kemiskinan tidak memperlihatkan perbedaan tajam didasarkan pada dimensi etnisitasnya. Perbedaan latar belakang etnik tidak melahirkan pola perilaku berbeda pada komunitas kaum perempuan buruh perkebunan di PTPN X Ajung Kabupaten Jember.

Secara objektif, potret kaum perempuan buruh perkebunan, yang beretnik Jawa maupun Madura, memiliki latar pendidikan rendah (mayoritas tidak tamat SD dan tamatan SD), sudah menikah sejak usia dini (usia 10 s.d 15 dan 15 s.d 20 tahun), tidak memiliki *life skill* yang memadai untuk dapat mengakses pekerjaan yang lebih menjanjikan dari segi *income*, berperan ganda, bahkan multi ganda, sebelum dan sesudah menikah, di sektor pekerjaan domestik maupun non-domestik, menjadi penopang atau pilar utama perekonomian keluarga dan tidak mengidentifikasi diri sebagai orang miskin. Namun, secara substantif mengakui dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masih mengalami kesulitan, terutama dalam hal menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, membangun rumah permanen yang lebih layak bagi kehidupan keluarga, dan memenuhi kebutuhan kesehatan.

Problema kemiskinan yang dihadapi kaum perempuan buruh perkebunan, sesungguhnya sangat kompleks, tetapi tidak memunculkan perbedaan tajam karena tidak hanya mengandalkan sektor perkebunan sebagai satu-satunya penopang hidup tetapi juga mengembangkan pekerjaan alternatif di sektor informal.

Daftar Pustaka

- Azhar, Ipong. 1999. *Radikalisasi Petani Masa Orde Baru: Kasus Sengketa Tanah Jenggawah*. Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia.
- Gilbert, Alan dan Josef Gugler. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Kartodirdjo, Sartono. 1973. *Protest Movement in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Century*. Singapore: Oxford University Press.
- Kuntowijoyo. 1993. *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama.
- Santoso, Hery. 2004. *Perlawanan di Simping Jalan: Kontes Harian di Desa-desa Sekitar Hutan di Jawa*, Yogyakarta: Damar.
- Scott, James C. 1976. *The Moral Economy of Peasant* terbitan New Haven: Yale University Press.

- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani* dialihbahasakan Budi Kusworo. Jakarta: Yayasan Obor.
- Susanto, Astrid S. 1995. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Bina Cipta.
- Wahab, Sholichin Abdul. 2000. *Tujuan, Strategi, dan Model dalam Penelitian Kualitatif*. Makalah disampaikan dalam Latihan Penelitian Kualitatif Bagi Dosen PTAIS, STAIN, dan PAI pada PTU Se-Kopertais Wilayah IV. Malang: Lemlit Unisme kerjasama dengan Depag RI.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2000. *Realitas Sosial Sebagai Obyek Kajian* (Makalah disampaikan dalam Latihan Penelitian Kualitatif Bagi Dosen PTAIS, STAIN, dan PAI pada PTU Se-Kopertais Wilayah IV. Malang: Lemlit Unisme kerjasama dengan Depag RI.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2001. *Fenomena CQ Realitas Sosial Sebagai Obyek Kajian Ilmu (Sains) Sosial*, dalam Burhan Bungin (ed.) *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wolf, E. J. 1969. *Peasant Wars of Twentieth Century*. New York: Harper and Rowy.